

MODEL KOMUNIKASI HUMAS PEMPROV SULSEL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

Nur Istiqamah Desiana¹, Andi Nur Aisyah Rusnali², Hijiriani³

¹ Universitas Almarisah Madani, Makassar, Indonesia; istydesiana1234@gmail.com¹

² IAIN Bone, Indonesia; Rusnaliaisyah@gmail.com²

³ Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia; hijiriani.fs@umi.ac.id³

*Correspondence : istydesiana1234@gmail.com¹

ABSTRAK

Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah ditentukan secara fundamental oleh kualitas dan sensitivitas kultural komunikasi kelembagaan. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi model komunikasi humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mengeksplorasi integrasi kearifan lokal dalam praktik kehumasan, serta merumuskan model komunikasi berbasis kultural sebagai kerangka strategis pembangunan kepercayaan publik. Pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa praktik humas Pemprov Sulsel masih didominasi model *public information* yang monologis dan birokratis. Nilai kearifan lokal *siri' na pacce*, sipakatau, sipakalebbi, dan abbulo sibatang baru terintegrasi secara simbolik, belum menyentuh dimensi substansial. Kajian ini menghasilkan Model Komunikasi Humas Kultural-Dialogis dengan empat prinsip: kultural-empatik, dialogis-partisipatif, autentik-konsisten, dan adaptif-kontekstual. Secara teoretis, kajian ini berkontribusi pada pengembangan kajian *government public relations* dengan menawarkan kerangka integrasi nilai kearifan lokal sebagai variabel kultural dalam model komunikasi kelembagaan pemerintah daerah. Kepercayaan publik tumbuh melalui resonansi nilai yang dihayati bersama, bukan sekadar volume informasi yang disebarkan.

Kata kunci

Kearifan Lokal, Kepercayaan Publik, Public Relations, Sulawesi Selatan, Two-Way Symmetrical

ABSTRACT

Public trust in local government institutions is fundamentally determined by the quality and cultural sensitivity of institutional communication. This study aims to identify the public relations communication model of the South Sulawesi Provincial Government, explore the integration of local wisdom values in public relations practice, and formulate a culturally-based communication model as a strategic framework for building public trust. A qualitative approach through library research was employed. Findings indicate that public relations practices remain dominated by a monologic and bureaucratic public information model. Local wisdom values *siri' na pacce*, sipakatau, sipakalebbi, and abbulo sibatang have only been integrated symbolically, not yet substantively. This study produces the Cultural-Dialogic PR Communication Model guided by four principles: cultural-empathic, dialogic-participatory, authentic-consistent, and adaptive-contextual. Theoretically, this study contributes to the advancement of government public relations scholarship by proposing an integrative framework that positions local wisdom values as cultural variables within institutional communication models. Public trust grows through shared value resonance, not merely information volume.

Keywords

Local Wisdom, Public Relations, Public Trust, South Sulawesi, Two-Way Symmetrical

Pendahuluan

Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis. Dalam era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan juga mampu membangun relasi yang bermakna dengan masyarakat melalui strategi komunikasi yang adaptif dan responsif. Hubungan Masyarakat (*Public Relations*) pemerintah menjadi garda terdepan dalam upaya tersebut, mengingat perannya yang strategis sebagai jembatan antara institusi negara dengan publik yang dilayaninya. Secara universal, kehumasan pemerintah bertanggung jawab dalam membentuk persepsi positif, mengelola informasi, serta menjaga reputasi lembaga di mata masyarakat. Tantangan ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada keragaman budaya dan karakteristik sosial masyarakat lokal yang menuntut pendekatan komunikasi yang lebih kontekstual dan berakar pada nilai-nilai setempat.

Secara khusus, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menghadapi dinamika komunikasi publik yang unik. Sebagai provinsi dengan keragaman suku dan budaya yang kaya mulai dari Bugis, Makassar, Toraja, hingga Mandar komunikasi kelembagaan yang bersifat seragam dan *impersonal* cenderung kurang efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah secara nasional. Data Survei Kepercayaan Institusi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah secara umum masih berada di bawah 60%, dengan variasi yang signifikan antara daerah perkotaan dan komunitas pedesaan yang memiliki ikatan budaya lebih kuat. Sementara itu, kajian tentang persepsi publik terhadap komunikasi pemerintah di Kawasan Indonesia Timur mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung lebih mempercayai informasi yang disampaikan melalui tokoh adat atau pemuka komunitas dibandingkan melalui kanal komunikasi formal kelembagaan (Harahap & Kholil, 2025). Realitas ini mengisyaratkan bahwa kesenjangan antara kapasitas komunikasi institusional Pemprov Sulsel dengan ekspektasi kultural masyarakatnya merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan pendekatan strategis berbasis akar budaya lokal. Penerapan *cyber public relations* yang telah dilakukan oleh lembaga legislatif daerah di Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan platform digital seperti *website*, *Facebook*, dan *Instagram* membuktikan adanya upaya konkret dalam membangun citra positif sekaligus mengelola informasi secara sistematis (Nur, Zelfia, & Ibrahim, 2025). Meskipun demikian, pendekatan berbasis teknologi semata belum cukup bila tidak diimbangi dengan *sensitivitas* terhadap kearifan lokal yang menjadi identitas kultural masyarakat Sulawesi Selatan. Nilai-nilai seperti *siri'* na pacce, sipakatau, dan sipakalebbi yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat setempat sejatinya merupakan modal kultural yang potensial untuk diintegrasikan dalam model komunikasi kehumasan pemerintah.

Fenomena ini relevan dengan temuan riset di berbagai daerah lain yang menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam komunikasi pelayanan publik berkontribusi signifikan terhadap efektivitas layanan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Penelitian terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Surabaya memperlihatkan bahwa nilai-nilai lokal seperti wani, egaliter, dan gotong royong yang diintegrasikan dalam setiap tahap pelayanan mampu

meningkatkan kenyamanan sekaligus kepercayaan pemohon secara signifikan (Manshur, Azura, Izzah, & Sari, 2025). Hal serupa juga ditemukan dalam konteks tata kelola kolaboratif berbasis kearifan lokal di komunitas adat Suku Kulawi, Sulawesi Tengah, di mana nilai-nilai tradisional terbukti menjadi pilar penting dalam membangun ketahanan komunitas dan memperkuat legitimasi pemerintahan berbasis masyarakat (Dwiputri, Permana, & Prastiwi, 2025). Temuan-temuan ini mengisyaratkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar ornamen budaya, melainkan instrumen strategis yang dapat memperkuat model komunikasi pemerintah.

Di sinilah terletak ketegangan mendasar (*research tension*) yang menjadi titik berangkat kajian ini: di satu sisi, tuntutan modernisasi komunikasi pemerintah mendorong adopsi platform digital, pendekatan PR berbasis data, dan standar komunikasi global yang bersifat seragam dan terukur; namun di sisi lain, masyarakat Sulawesi Selatan hidup dalam ekosistem kultural yang kaya, di mana kepercayaan tidak dibangun melalui volume informasi atau kecanggihan teknologi, melainkan melalui kedalaman nilai yang dihayati bersama. Model komunikasi modern yang mengabaikan dimensi kultural ini tidak hanya gagal membangun kepercayaan, tetapi bahkan berisiko memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan warganya. Pertanyaan kritis yang kemudian muncul adalah: apakah modernisasi komunikasi humas pemerintah harus dilakukan dengan meninggalkan akar budaya lokal, ataukah justru melalui integrasi nilai-nilai lokal itulah modernisasi komunikasi yang bermakna dapat dicapai?

Gap penelitian yang teridentifikasi terletak pada minimnya kajian yang secara spesifik mengeksplorasi model komunikasi humas pemerintah provinsi yang secara integratif menggabungkan pendekatan teoritik seperti empat model komunikasi Grunig dan Hunt yang mencakup *Press Agency*, *Public Information*, *Two-Way Asymmetrical*, dan *Two-Way Symmetrical* dengan dimensi kearifan lokal sebagai landasan operasionalnya (Muktiarsih, Wisudawanto, & Indreswari, 2025). Sebagian besar riset yang ada masih berfokus pada analisis strategi komunikasi secara generik tanpa mempertimbangkan konteks kultural yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan kajian tentang kehumasan desa wisata pun telah menunjukkan bahwa penggabungan nilai budaya lokal dengan pendekatan komunikasi modern mampu menghasilkan peningkatan partisipasi publik dan penguatan citra yang terukur (Adib & Bahtiar, 2026), namun studi semacam ini belum banyak diterapkan pada level pemerintahan provinsi.

Secara lebih spesifik, gap penelitian ini dapat diidentifikasi pada tiga dimensi. Pertama, gap teoretis: belum ada penelitian yang secara eksplisit menjembatani model PR Grunig & Hunt dengan sistem nilai kearifan lokal Sulsel sebagai satu kesatuan kerangka konseptual yang teruji. Kedua, gap kontekstual: kajian tentang komunikasi humas pemerintah di Indonesia umumnya dilakukan pada konteks Jawa-sentris, sehingga menghasilkan model yang kurang relevan bagi provinsi dengan identitas budaya non-Jawa yang kuat seperti Sulawesi Selatan. Ketiga, gap operasional: sebagian besar kajian yang membahas kearifan lokal dalam komunikasi masih berhenti pada tataran deskriptif tanpa menghasilkan model yang applicable dan dapat dioperasionalisasikan dalam praktik kehumasan pemerintah daerah. Ketiga gap ini secara kolektif menegaskan urgensi dan relevansi kajian ini sebagai upaya menjawab kekosongan yang belum tertangani oleh penelitian-penelitian sebelumnya. *Novelty* atau kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengonstruksi sebuah model komunikasi humas pemerintah yang secara eksplisit berbasis kearifan lokal Sulawesi Selatan sebagai strategi membangun kepercayaan publik.

Secara spesifik, model yang dihasilkan kajian ini berbeda dari model-model komunikasi humas pemerintah daerah yang telah ada dalam beberapa aspek kunci. Pertama, kajian Muktiarsih, Wisudawanto, & Indreswari (2025) tentang humas Pemerintah Kabupaten Sragen dan penelitian Eviany & Athahirah (2023) tentang komunikasi pemerintah Banten hanya menganalisis penerapan model komunikasi yang sudah ada tanpa merumuskan model baru yang berbasis kultural. Kedua, berbeda dengan penelitian Saoqillah et al. (2025) yang membangun model PR berbasis kearifan lokal pada level program studi perguruan tinggi, kajian ini beroperasi pada konteks pemerintahan provinsi dengan kompleksitas struktur birokrasi, keragaman stakeholder, dan skala tanggung jawab publik yang jauh lebih besar. Ketiga, model yang dirumuskan dalam kajian ini bersifat berlapis (*layered*): tidak hanya menempatkan kearifan lokal sebagai elemen simbolik atau dekoratif, tetapi mengintegrasikannya secara substantif ke dalam tiga lapisan yang saling terhubung filosofis, strategis, dan operasional sehingga model ini tidak hanya bernilai konseptual tetapi juga dirancang untuk dapat diimplementasikan secara langsung dalam praktik humas Pemprov Sulsel.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana model komunikasi humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang selama ini diterapkan dalam membangun kepercayaan publik? (2) Bagaimana integrasi nilai-nilai kearifan lokal Sulawesi Selatan dalam model komunikasi humas pemerintah daerah? (3) Bagaimana konstruksi model komunikasi humas berbasis kearifan lokal yang ideal dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis model komunikasi humas yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun kepercayaan publik; (2) Mengeksplorasi dan menganalisis bentuk integrasi nilai-nilai kearifan lokal Sulawesi Selatan dalam praktik komunikasi kehumasan pemerintah daerah; (3) Merumuskan konstruksi model komunikasi humas berbasis kearifan lokal yang relevan dan applicable sebagai kerangka strategis dalam membangun kepercayaan publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, khususnya kajian public relations pemerintahan, dengan menawarkan perspektif baru mengenai integrasi kearifan lokal sebagai variabel kultural dalam model komunikasi kelembagaan. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merancang strategi komunikasi kehumasan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis identitas budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah lain yang memiliki keragaman budaya serupa dalam upaya membangun kepercayaan publik melalui pendekatan komunikasi yang lebih humanis dan kultural.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* atau penelitian kepustakaan, yakni suatu metode yang menempatkan berbagai sumber tertulis sebagai basis utama pengumpulan dan analisis data. Sebagaimana ditegaskan oleh Sari & Asmendri (2020), penelitian kepustakaan merupakan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data dengan memanfaatkan beragam material pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel,

maupun dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pilihan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kajian tentang model komunikasi kehumasan pemerintah berbasis kearifan lokal memerlukan kedalaman konseptual dan teoritis yang hanya dapat diperoleh melalui sintesis komprehensif atas berbagai literatur yang telah ada. Pendekatan *library research* dalam konteks ini bukan sekadar aktivitas membaca dan mengumpulkan referensi, melainkan sebuah proses intelektual yang sistematis dan kritis. Adlini et al. (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif studi pustaka dilakukan dengan desain yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau perhitungan angka, melainkan diarahkan untuk mengungkap fenomena secara *holistic-contextual* dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data. Konsekuensinya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan cenderung menggunakan pendekatan induktif, di mana proses dan makna berdasarkan perspektif subjek kajian lebih dikedepankan sebagai orientasi utama penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan atas dua kategori. Pertama, sumber data primer, yang terdiri atas dokumen resmi kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, peraturan daerah yang berkaitan dengan tata kelola komunikasi publik, laporan kinerja biro humas pemerintah daerah, serta kajian akademik yang secara spesifik membahas *public relations* pemerintah dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan. Kedua, sumber data sekunder, yang mencakup jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi di bidang ilmu komunikasi, kehumasan, dan kajian budaya, buku-buku referensi tentang model komunikasi *Grunig* dan *Hunt*, laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta artikel ilmiah yang membahas integrasi kearifan lokal dalam praktik komunikasi kelembagaan pemerintah daerah di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Proses ini meliputi beberapa tahapan yang saling berkesinambungan: (1) identifikasi dan penentuan kata kunci penelusuran yang relevan, seperti *public relations* pemerintah, model komunikasi kehumasan, kearifan lokal Sulawesi Selatan, kepercayaan publik, dan *two-way symmetrical communication*; (2) pengumpulan sumber-sumber pustaka dari berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda Kemdikbud, dan SINTA; (3) seleksi dan evaluasi kualitas sumber berdasarkan relevansi, kebaruan, serta kredibilitas akademiknya; dan (4) pencatatan dan pengorganisasian data secara sistematis ke dalam kerangka tematik yang mendukung rumusan masalah penelitian.

Secara kuantitatif, proses penelusuran literatur menghasilkan total 47 dokumen yang teridentifikasi dari berbagai basis data ilmiah. Setelah melalui tahap seleksi berdasarkan relevansi topik, kebaruan, dan kredibilitas sumber, sebanyak 28 artikel dan dokumen ditetapkan sebagai korpus utama kajian ini. Rentang tahun literatur yang digunakan dibatasi pada periode 2021 hingga 2026, dengan pertimbangan bahwa perkembangan kajian *government public relations* berbasis kearifan lokal mengalami akselerasi signifikan pasca-2015 seiring menguatnya wacana desentralisasi komunikasi dan identitas budaya daerah dalam tata kelola publik Indonesia. Pengecualian diberikan pada satu sumber yang terbit sebelum 2015, yaitu Synder (2021), mengingat posisinya sebagai karya seminal yang secara langsung membahas relasi kearifan lokal dan model *two-way symmetrical PR* dalam konteks Indonesia. Pemilihan sumber diprioritaskan pada: (1) artikel jurnal terindeks SINTA 1–2, Scopus, atau *Web of Science*; (2) kajian yang secara spesifik membahas komunikasi pemerintah daerah, *public relations*, dan kearifan lokal; serta (3) dokumen kebijakan dan laporan kelembagaan yang memiliki relevansi

langsung dengan konteks Pemprov Sulsel. Sumber-sumber yang bersifat populer, tidak terindeks, atau tidak memiliki proses *peer review* secara konsisten dikeluarkan dari korpus analisis.

Synder (2021) menegaskan bahwa dalam *literature review* sebagai metodologi penelitian, peneliti dituntut untuk mendeskripsikan secara transparan proses perancangan kajian, cara identifikasi literatur, proses analisis, sintesis, hingga pelaporan temuan, sehingga pembaca dapat menilai kualitas dan keterpercayaan hasil penelitian secara mandiri. Mengacu pada prinsip tersebut, penelitian ini mengadopsi proses analisis data yang mencakup tiga tahap utama. Tahap pertama adalah *organizing*, yakni pengklasifikasian bahan pustaka yang terkumpul berdasarkan relevansinya terhadap tiga rumusan masalah penelitian. Tahap kedua adalah *synthesizing*, yaitu penyatuan berbagai perspektif dan temuan dari literatur yang berbeda untuk membentuk pemahaman yang koheren tentang model komunikasi humas pemerintah dan dimensi kearifan lokal. Tahap ketiga adalah *constructing*, yakni perumusan kerangka konseptual baru yang merupakan produk akhir dari proses sintesis tersebut.

Keabsahan data dijamin melalui penerapan teknik triangulasi sumber, di mana setiap klaim analitik dikonfirmasi oleh minimal dua sumber literatur yang independen satu sama lain. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan prinsip audit trail, yaitu pencatatan yang jelas dan dapat dilacak mengenai asal-usul setiap data dan argumen yang dikembangkan. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi untuk memastikan bahwa konstruksi model komunikasi humas berbasis kearifan lokal yang dihasilkan oleh penelitian ini memiliki landasan epistemologis yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan bermakna sebagai kontribusi nyata bagi pengembangan kajian komunikasi pemerintahan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Model Komunikasi Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Membangun Kepercayaan Publik

Identifikasi Model Komunikasi Humas yang Diterapkan

Praktik hubungan masyarakat (*public relations*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritis yang telah mapan dalam kajian komunikasi kelembagaan. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan secara sistematis, praktik humas Pemprov Sulsel dapat dipetakan menggunakan empat model Grunig & Hunt yang telah menjadi rujukan dominan dalam studi PR global maupun kontekstual. Zainuddin & Djusan (2015) menegaskan bahwa sebagian besar penelitian *public relations* mengadopsi model Grunig yang membagi praktik PR ke dalam empat tipe, yaitu *press agency*, *public information*, *two-way asymmetrical*, dan *two-way symmetrical*. Sejarah mencatat bahwa praktik PR cenderung bertumpu pada dua model pertama sebelum kemudian bergeser menuju komunikasi dua arah yang dinilai lebih efektif.

Dalam konteks Pemprov Sulsel, model *Public Information* teridentifikasi sebagai model yang paling dominan diterapkan. Hal ini tercermin dari pola diseminasi informasi yang bersifat satu arah, seperti penerbitan siaran pers, pengelolaan website resmi, dan penggunaan media massa lokal sebagai kanal utama penyebaran pesan kelembagaan. Model ini memang memiliki keunggulan dalam hal jangkauan dan konsistensi pesan, namun memiliki kelemahan mendasar, yakni tidak mengakomodasi umpan balik publik secara sistematis. Sebagai ilustrasi empiris, praktik dominasi model *public information*

pada Pemprov Sulsel dapat diamati dari pola pengelolaan kanal komunikasi resminya. Biro Humas Pemprov Sulsel secara aktif memproduksi siaran pers harian, mengelola akun media sosial Instagram dan Facebook resmi gubernur, serta memublikasikan capaian program melalui website Sulsel.go.id dengan frekuensi tinggi namun tanpa mekanisme respons atau tindak lanjut terstruktur terhadap komentar dan pertanyaan publik. Pola serupa ditemukan dalam kajian implementasi *cyber public relations* lembaga legislatif Sulsel, di mana pemanfaatan platform digital seperti website, Facebook, dan Instagram terbukti efektif dalam membangun citra positif, namun belum dioptimalkan sebagai ruang dialog dua arah yang sesungguhnya (Nur, Zelfia, & Ibrahim, 2025). Kondisi ini mempertegas bahwa orientasi komunikasi masih terpusat pada penyebaran pesan kelembagaan, bukan pada pembangunan relasi dialogis dengan publik. Fardiah et al. (2024) menemukan bahwa transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Jawa Barat telah mendorong pemerintah daerah bergerak ke arah komunikasi yang lebih interaktif, di mana proses interaksi mencakup pembangunan infrastruktur, penyediaan informasi, interaksi dua arah, dan pengelolaan umpan balik. Temuan ini menjadi cermin perbandingan bagi Pemprov Sulsel yang dinilai masih dalam tahap transisi menuju model yang lebih dialogis.

Model *Two-Way Asymmetrical* mulai tampak dalam praktik humas Pemprov Sulsel melalui kegiatan survei kepuasan publik dan respons terhadap pemberitaan media. Namun demikian, model ini belum sepenuhnya bersifat dialogis, karena arah komunikasi masih cenderung dikendalikan oleh kepentingan institusi. Sementara itu, model *Two-Way Symmetrical* yang paling ideal dalam membangun kepercayaan publik hanya tampak secara terbatas, misalnya dalam forum-forum seperti *musrenbang*, tanpa didukung mekanisme umpan balik yang terstruktur dan konsisten. Secara konkret, keterbatasan ini tampak dari fakta bahwa forum *musrenbang* di tingkat provinsi yang seharusnya menjadi ruang dialog partisipatif antara pemerintah dan warga, dalam praktiknya masih didominasi oleh agenda dan framing institusional. Aspirasi komunitas adat dan masyarakat pedesaan yang disampaikan dalam forum tersebut kerap tidak memiliki jalur tindak lanjut yang transparan dan terverifikasi publik. Temuan ini selaras dengan kajian komunikasi pemerintahan di Banten yang mengidentifikasi bahwa fungsi mendidik dan menghibur dalam komunikasi pemerintah belum dimaksimalkan, sementara fungsi memengaruhi dan menyampaikan kebijakan masih mendominasi seluruh arsitektur komunikasi kelembagaan (Eviany & Athahirah, 2023). Pola yang sama berlaku di Sulsel, di mana ruang-ruang dialogis yang tersedia bersifat seremonial dan tidak menghasilkan perubahan substansial dalam kebijakan komunikasi.

Eviany & Athahirah (2023) menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintahan Banten, terdapat dua fungsi komunikasi pemerintah yang telah berjalan yakni fungsi memengaruhi dan menyampaikan kebijakan, sementara fungsi mendidik dan menghibur belum dimaksimalkan. Kondisi serupa terjadi di Sulsel, di mana komunikasi humas masih terjebak dalam pola *top-down* dan birokratis.

Pola komunikasi yang cenderung *top-down* ini menjadi akar masalah yang signifikan. Pesan-pesan komunikasi dikonstruksi berdasarkan kepentingan institusi, bukan dari kebutuhan dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi jarak psikologis antara pemerintah dan warga, khususnya komunitas-komunitas yang memiliki ikatan kultural kuat. Harahap & Kholil (2025) menemukan bahwa dalam konteks pemerintahan desa, integrasi komunikasi formal dan informal terbukti meningkatkan efektivitas promosi dan partisipasi masyarakat, mengindikasikan bahwa

keseimbangan antara saluran struktural dan kultural merupakan kunci keberhasilan komunikasi kelembagaan.

Saluran Komunikasi dan Capaian dalam Membangun Kepercayaan Publik

Saluran komunikasi yang digunakan oleh humas Pemprov Sulsel dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar: media digital, media konvensional, dan media interpersonal. Masing-masing saluran memiliki kekuatan dan keterbatasan tersendiri dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat Sulawesi Selatan yang beragam secara demografis dan kultural. Fardiah et al. (2024) mengkategorikan komunikasi publik pemerintah mencakup layanan untuk masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah, dan aparatur negara, dengan proses interaksi yang melibatkan berbagai infrastruktur digital maupun non-digital.

Media digital seperti website resmi, Instagram, Facebook, dan YouTube digunakan sebagai kanal utama dalam strategi komunikasi Pemprov Sulsel. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kesenjangan digital (*digital gap*) yang cukup signifikan, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat. Homogenitas pesan yang disebarkan melalui media digital juga menjadi kritik yang relevan, karena konten komunikasi seringkali tidak mencerminkan keragaman sub-kultural masyarakat Sulsel. Contoh konkret dari persoalan ini dapat diamati pada konten media sosial resmi Pemprov Sulsel yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia formal dan format visual generik tanpa elemen khas budaya Bugis, Makassar, Toraja, maupun Mandar. Kampanye komunikasi terkait program prioritas gubernur seperti program ketahanan pangan dan digitalisasi UMKM dikomunikasikan dalam format infografis standar yang tidak mempertimbangkan konteks kultural komunitas sasaran di wilayah pedalaman dan pesisir.

Akibatnya, komunitas adat dan masyarakat di kawasan dengan penetrasi digital rendah tidak hanya sulit mengakses informasi secara teknis, tetapi juga tidak menemukan resonansi kultural dalam pesan yang disampaikan. Yusnendar et al. (2024) menegaskan bahwa kelemahan dalam konsistensi pesan dan ketiadaan pemetaan audiens berbasis budaya lokal menjadi hambatan struktural utama dalam komunikasi kelembagaan, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan. Yusnendar et al. (2024) menemukan hal serupa dalam konteks komunikasi kelembagaan pendidikan tinggi, di mana kelemahan dalam konsistensi pesan dan kurangnya koordinasi antara unit menjadi hambatan utama, serta menekankan pentingnya komunikasi strategis berbasis pemetaan audiens dan budaya lokal.

Media konvensional berupa siaran pers, konferensi pers, dan media cetak lokal masih dipertahankan untuk menjangkau segmen masyarakat yang tidak terhubung secara digital. Sementara media interpersonal seperti kunjungan lapangan dan pertemuan komunitas digunakan, namun bersifat insidental dan tidak terstruktur. Saoqillah et al. (2025) menegaskan bahwa strategi PR yang masih mengandalkan pendekatan konvensional terbukti kurang kontekstual dan tidak mampu membangun koneksi emosional yang kuat dengan pemangku kepentingan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa Pemprov Sulsel membutuhkan restrukturisasi strategi komunikasi yang lebih holistik dan berbasis nilai kultural.

Tabel 1. Pemetaan Saluran Komunikasi Humas Pemprov Sulsel dan Efektivitasnya

Jenis Saluran	Bentuk Konkret	Kekuatan	Keterbatasan	Relevansi terhadap Kepercayaan Publik
Media Digital	Website resmi, Instagram, Facebook, YouTube	Jangkauan luas, cepat, interaktif	Digital homogenitas pesan, sensitivitas kultural	gap, Sedang efektif untuk segmen urban, terbatas untuk komunitas adat
Media Konvensional	Siaran pers, konferensi pers, media cetak lokal	Menjangkau segmen non-digital, kredibel	Satu arah, lambat, kurang personal	Rendah-sedang informatif namun tidak membangun kedekatan emosional
Media Interpersonal	Kunjungan lapangan, pertemuan komunitas, musrenbang	Personal, dialogis, membangun kepercayaan	Insidental, tidak terstruktur, bergantung momentum politik	Tinggi berpotensi kuat namun belum dioptimalkan secara sistematis
Media Berbasis Tokoh	Pelibatan tokoh adat, pemuka agama, opinion leader	Legitimasi kultural tinggi, kepercayaan organik	Tidak terstandarisasi, bergantung individu	Tinggi paling relevan untuk komunitas yang berorientasi kultural

Sumber: Diolah dari Fardiah et al. (2024); Yusnendar et al. (2024); Harahap & Kholil (2025); Saoqillah et al. (2025)

Capaian kepercayaan publik Pemprov Sulsel melalui saluran-saluran tersebut masih belum merata. Masyarakat di wilayah adat dan pedesaan cenderung memiliki jarak psikologis lebih besar terhadap komunikasi formal pemerintah. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi kesenjangan digital, homogenitas pesan, dan minimnya sensitivitas kultural dalam konstruksi konten komunikasi. Lestari et al. (2026) menemukan bahwa nilai-nilai kultural seperti komunikasi berbasis kekeluargaan, *unggah-ungguh* (kesopanan), dan *tepa slira* (empati) yang menjadi basis strategi mitigasi PR rumah sakit swasta di Jawa Tengah terbukti mampu membangun kedekatan emosional antara institusi dan komunitas serta mereduksi eskalasi konflik. Temuan ini memberikan landasan empiris yang kuat bahwa saluran komunikasi saja tidak cukup tanpa diisi oleh nilai-nilai kultural yang relevan dan autentik.

Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sulawesi Selatan dalam Model Komunikasi Humas Pemerintah Daerah

Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sulsel yang Relevan bagi Komunikasi Humas

Sulawesi Selatan memiliki kekayaan kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga mengandung substansi etis dan sosial yang relevan bagi praktik komunikasi kelembagaan. Menurut Zainuddin & Djuan (2015) kearifan

lokal merupakan sistem nilai yang diwariskan antargenerasi dan mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kebiasaan masyarakat.

Siri' na Pacce merupakan nilai filosofis paling fundamental dalam budaya Bugis-Makassar yang mengandung makna harga diri (*siri'*) dan solidaritas sosial (*pacce*). Dalam konteks komunikasi humas, nilai ini menjadi landasan etis bahwa setiap pesan yang dikonstruksi oleh pemerintah harus menghormati martabat publik dan tidak bersifat merendahkan atau memanipulasi. Komunikasi yang melanggar nilai *siri'* akan segera kehilangan legitimasinya di mata masyarakat Sulsel. *Sipakatau*, yang berarti saling memmanusiakan, menjadi prinsip yang relevan untuk membangun komunikasi yang empatik, inklusif, dan menempatkan warga sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Saoqillah et al. (2025) menemukan bahwa strategi PR yang mampu membangun koneksi emosional dengan pemangku kepentingan terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan daya tarik institusional, sebuah prinsip yang selaras dengan nilai *sipakatau*.

Sipakalebbi, yang bermakna saling menghargai dan mengakui kontribusi, memiliki relevansi dalam membangun komunikasi yang apresiatif terhadap aspirasi masyarakat. Nilai ini mendorong humas pemerintah untuk tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengakui dan merespons masukan publik secara substantif. *Abbulo sibatang*, semangat gotong royong dan kebersamaan, menjadi fondasi komunikasi kolaboratif antara pemerintah dan komunitas. Higau et al. (2025) menemukan dalam studinya tentang tata kelola CSR di Kampung Tukul, West Kutai, bahwa praktik kolaborasi lintas aktor yang menghormati nilai budaya lokal telah meningkatkan legitimasi sosial, memperkuat institusi komunitas, dan meminimalkan konflik. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa nilai *abbulo sibatang* dapat menjadi instrumen operasional dalam membangun komunikasi humas yang kolaboratif dan partisipatif.

Tabel 2. Pemetaan Nilai Kearifan Lokal Sulsel dan Relevansinya dalam Komunikasi Humas

Nilai Kearifan Lokal	Makna Inti	Prinsip Komunikasi yang Direpresentasikan	Implementasi dalam Humas
<i>Siri' na Pacce</i>	Harga diri dan solidaritas sosial	Komunikasi yang menghormati martabat publik	Konstruksi pesan yang tidak merendahkan; penanganan krisis yang bermartabat
<i>Sipakatau</i>	Saling memmanusiakan	Komunikasi empatik dan inklusif	Warga sebagai subjek bukan objek; pelibatan komunitas dalam dialog kebijakan
<i>Sipakalebbi</i>	Saling menghargai kontribusi	Komunikasi yang apresiatif dan responsif	Pengakuan aspirasi publik; merespons masukan secara substantif
<i>Abbulo Sibatang</i>	Gotong royong dan kebersamaan	Komunikasi kolaboratif dan partisipatif	Jaringan komunikasi berbasis komunitas; forum deliberatif lintas aktor

Sumber: Diolah dari Zainuddin & Djuan (2015); Saoqillah et al. (2025); Higau et al. (2025); Hidayat et al. (2018)

Hidayat et al. (2018) dalam studinya tentang perilaku komunikasi Suku Jakhu di Lampung menemukan bahwa konsep budaya lokal seperti *pekhsiapan* (persiapan), *khencana* (perencanaan), *lestakhi* (pelaksanaan), *penghengok* (dukungan), dan *penghanggum* (kepercayaan) relevan dengan komponen perencanaan komunikasi modern, termasuk model IPPAR (*Insight, Strategic Programs, Implementation Programs, Action, and Reputation*). Analogi ini sangat relevan bagi Sulsel, karena nilai-nilai *siri' na pacce*, *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *abbulo sibatang* juga memiliki struktur internal yang dapat dioperasionalkan secara sistematis dalam siklus komunikasi humas. Nilai-nilai ini bukan sekadar ornamen budaya, melainkan instrumen kultural yang operasional apabila diintegrasikan secara substantif dalam strategi humas pemerintah daerah.

Bentuk dan Tingkat Integrasi Kearifan Lokal dalam Praktik Komunikasi Humas

Integrasi kearifan lokal dalam praktik komunikasi humas pemerintah dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan yang mencerminkan kedalaman dan kesungguhan institusi dalam mengadopsi nilai kultural sebagai bagian dari strategi komunikasinya. Sawir (2025) menemukan dalam konteks transformasi layanan publik Papua bahwa integrasi nilai-nilai adat ke dalam sistem pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan dan membangun kepercayaan publik, namun proses transformasi ini menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan serta keterbatasan sumber daya.

Tingkatan pertama adalah integrasi simbolik, yakni penggunaan diksi, simbol, dan narasi budaya lokal dalam konten komunikasi. Dalam konteks Sulsel, ini dapat berwujud penggunaan bahasa Bugis atau Makassar dalam kampanye komunikasi tertentu, penggunaan motif *Lipa' Sabbe* dalam desain visual branding kelembagaan, atau pemanfaatan referensi tokoh historis lokal dalam narasi kebijakan. Integrasi pada level ini paling sering dijumpai dalam praktik humas pemerintah daerah karena relatif mudah diimplementasikan tanpa membutuhkan restrukturisasi sistemik. Namun, integrasi simbolik semata terbukti kurang efektif dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Bukti empiris dari pola integrasi simbolik ini dapat ditemukan dalam berbagai produk komunikasi resmi Pemprov Sulsel. Pada peringatan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya, konten komunikasi humas dihiasi dengan elemen visual *Lipa' Sabbe*, ornamen *Balla Lompoa*, dan kutipan filosofi *siri' na pacce*, namun elemen-elemen ini berhenti pada fungsi dekoratif tanpa menjadi landasan etis dalam proses pengambilan keputusan komunikasi.

Pola serupa tampak dalam siaran pers yang sesekali menyebut nilai gotong royong atau kearifan lokal sebagai retorika legitimasi kebijakan, namun tanpa mekanisme partisipasi komunitas yang substantif di baliknya. Saoqillah et al. (2025) menemukan kondisi identik dalam konteks komunikasi kelembagaan perguruan tinggi berbasis Islam, di mana elemen kearifan lokal yang hanya dihadirkan secara simbolik gagal membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan, dan justru menciptakan persepsi inkonsistensi antara nilai yang diklaim dan perilaku komunikasi aktual institusi. Saoqillah et al. (2025) menegaskan bahwa program studi yang belum mengoptimalkan elemen budaya lokal seperti seni tradisional, bahasa daerah, dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam komunikasi publik mengalami keterbatasan dalam membangun kepercayaan dan daya tarik akademik yang berkelanjutan.

Tingkatan kedua adalah integrasi prosedural, yakni pelibatan tokoh adat, pemuka agama, dan *opinion leader* komunitas sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga di tingkat komunitas. Model ini lebih efektif karena memanfaatkan jaringan

kepercayaan yang telah terbangun secara organik dalam masyarakat. Praktik integrasi prosedural ini dapat diidentifikasi dalam beberapa program komunikasi Pemprov Sulsel, antara lain pelibatan tokoh adat Bugis (*Arung* atau *Matoa*) dan pemuka agama dalam sosialisasi program vaksinasi COVID-19 di wilayah pedesaan Sulsel pada 2021–2022. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan program dibandingkan kampanye digital semata, karena tokoh-tokoh tersebut memiliki legitimasi kultural yang tidak dimiliki oleh komunikator formal kelembagaan. Harahap & Kholil (2025) mengonfirmasi temuan serupa dalam konteks pemerintahan desa, di mana kombinasi komunikasi formal dan informal yang melibatkan tokoh komunitas secara aktif terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan. Namun demikian, pelibatan tokoh adat dalam komunikasi Pemprov Sulsel masih bersifat situasional dan *momentum-driven*, belum diinstitusionalisasikan sebagai bagian permanen dari arsitektur komunikasi kehumasan. Harahap & Kholil (2025) menemukan bahwa kombinasi komunikasi formal dan informal, termasuk kegiatan gotong royong yang melibatkan komunitas, terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah desa. Sementara tingkatan ketiga, yang merupakan integrasi paling dalam, adalah integrasi substansial, yakni menjadikan nilai-nilai lokal sebagai kerangka etis dalam pengambilan keputusan komunikasi bukan hanya dalam penyampaian pesan, tetapi dalam seluruh siklus perencanaan, implementasi, dan evaluasi komunikasi humas.

Tabel 3. Tingkatan Integrasi Kearifan Lokal dalam Praktik Komunikasi Humas

Tingkatan Integrasi	Deskripsi	Contoh Praktik	Efektivitas terhadap Kepercayaan Publik
<i>Simbolik</i>	Penggunaan simbol, diksi, dan narasi budaya lokal dalam konten	Penggunaan bahasa Bugis/Makassar, motif Lipa' Sabbe dalam branding	Rendah-sedang meningkatkan identitas kultural tetapi tidak membangun kepercayaan struktural
<i>Prosedural</i>	Pelibatan tokoh adat dan opinion leader sebagai mediator komunikasi	Forum adat, kunjungan tokoh masyarakat, jaringan komunikasi berbasis komunitas	Sedang-tinggi memanfaatkan modal sosial yang telah terbangun
<i>Substansial</i>	Nilai lokal menjadi kerangka etis pengambilan keputusan komunikasi	Prinsip siri' na pacce menjadi standar etika dalam semua komunikasi krisis	Tinggi kepercayaan publik tumbuh secara organik dan berkelanjutan

Sumber: Diolah dari Saoqillah et al. (2025); Harahap & Kholil (2025); Sawir (2025); Lestari et al. (2026)

Dampak Integrasi Kearifan Lokal terhadap Kepercayaan Publik

Kajian literatur secara konsisten menunjukkan bahwa integrasi nilai kearifan lokal yang dilakukan secara substantif bukan sekadar simbolik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan kepercayaan publik. Lestari et al. (2026) menemukan bahwa nilai-nilai kultural Jawa seperti *unggah-ungguh*, *tepa slira*, dan *nguwongne* yang menjadi basis strategi mitigasi PR rumah sakit swasta di Jawa Tengah terbukti mampu memitigasi risiko komunikasi, mereduksi eskalasi konflik, dan membangun kedekatan emosional antara institusi kesehatan dan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa mitigasi PR berbasis kearifan lokal memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dengan

memperkuat komunikasi relasional dan legitimasi sosial. Temuan ini memiliki relevansi langsung bagi Pemprov Sulsel, mengingat kedalaman ikatan kultural masyarakat Sulsel terhadap nilai *siri' na pacce* dan *sipakatau*.

Higau et al. (2025) dalam konteks tata kelola CSR berbasis kearifan lokal menemukan bahwa kolaborasi lintas aktor yang menghormati nilai budaya telah membentuk forum-forum deliberatif, memetakan wilayah adat, dan mengembangkan program yang disesuaikan dengan nilai budaya setempat. Proses ini terbukti meningkatkan legitimasi sosial dan memperkuat institusi komunitas. Artinya, masyarakat Sulsel yang memiliki ikatan kultural kuat akan lebih responsif dan percaya terhadap komunikasi pemerintah yang secara autentik mencerminkan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Sebaliknya, absennya kearifan lokal dalam komunikasi pemerintah menjadikan pesan-pesan tersebut terasa asing, impersonal, dan tidak dipercaya oleh komunitas yang masih hidup dalam tradisi budaya lokal yang kuat.

Sebagai perbandingan kasus yang memperkuat argumen ini, pengalaman tata kelola kolaboratif berbasis kearifan lokal di komunitas adat Suku Kulawi, Sulawesi Tengah, memberikan bukti empiris yang relevan. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai tradisional yang secara konsisten diintegrasikan ke dalam mekanisme pengambilan keputusan bukan sekadar pada tataran simbolik terbukti membangun ketahanan komunitas, memperkuat legitimasi pemerintahan berbasis masyarakat, dan meningkatkan kepatuhan warga terhadap program-program yang disosialisasikan (Dwiputri, Permana, & Prastiwi, 2025). Analogi ini sangat relevan bagi Pemprov Sulsel: ketika nilai *abbulo sibatang* dan *sipakatau* dihadirkan bukan sebagai slogan dalam spanduk program, melainkan sebagai prinsip operasional yang tercermin dalam cara pemerintah merespons aspirasi publik, menangani krisis komunikasi, dan merancang pesan kebijakan, maka kepercayaan publik tidak sekadar meningkat secara sementara tetapi tumbuh secara organik dan berkelanjutan. Manshur et al. (2025) turut mengonfirmasi bahwa integrasi nilai lokal seperti *egaliter* dan *gotong royong* dalam setiap tahap pelayanan publik di Surabaya menghasilkan peningkatan kepercayaan pemohon yang terukur dan konsisten.

Konstruksi Model Komunikasi Humas Berbasis Kearifan Lokal yang Ideal dalam Membangun Kepercayaan Publik

Sintesis Konseptual: Membangun Fondasi Model

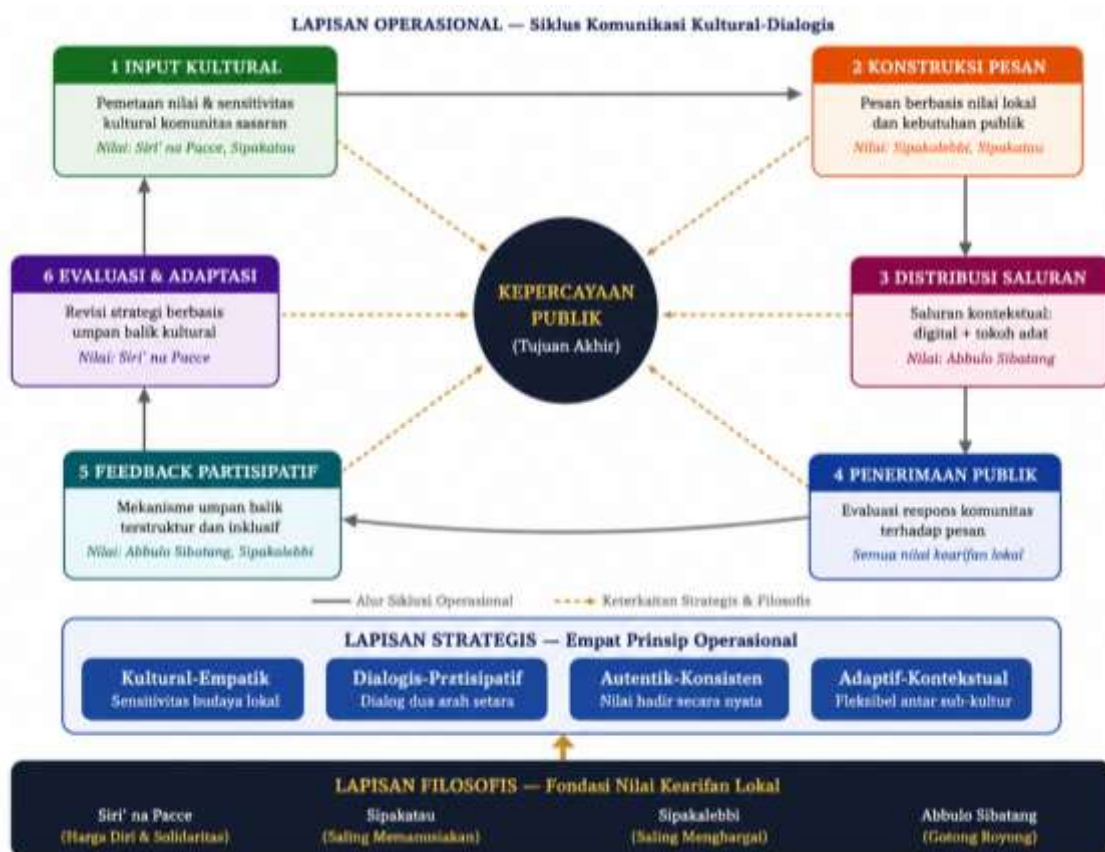
Perumusan model komunikasi humas yang ideal bagi Pemprov Sulsel dalam membangun kepercayaan publik membutuhkan sintesis konseptual yang menghubungkan teori PR modern dengan kekayaan nilai kearifan lokal Sulawesi Selatan. Sintesis ini bukan upaya menempatkan keduanya secara berhadapan atau saling menggantikan, melainkan membangun dialog produktif antara universalitas teori komunikasi dengan partikularitas budaya lokal. Zainuddin & Djusan (2015) telah membuka jalan bagi orientasi ini dengan menegaskan bahwa kearifan lokal sebagai bagian dari budaya memiliki potensi untuk menciptakan *two-way symmetrical public relations* yang selama ini menjadi standar tertinggi dalam kajian PR global. Pendekatan budaya terhadap PR yang mulai dibahas sejak 1992 melalui nilai-nilai Hofstede dan *Excellence Theory* memberikan legitimasi akademis bahwa budaya bukan hambatan bagi modernisasi komunikasi, melainkan sumber daya strategis.

Model yang dirumuskan dalam kajian ini merupakan sintesis antara model *Two-Way Symmetrical* Grunig & Hunt dengan nilai-nilai kearifan lokal Sulsel sebagai *filter* kultural di setiap tahap komunikasi. Posisi kearifan lokal dalam model ini bukan sebagai

variabel tambahan yang bersifat dekoratif, melainkan sebagai ruh dan prinsip dasar yang mewarnai seluruh proses komunikasi dari perencanaan hingga evaluasi. Eviany & Athahirah (2023) merumuskan model komunikasi pemerintah yang dikembangkan dari model komunikasi Schramm dalam bentuk sirkuler untuk membangun kredibilitas kepemimpinan, di mana semua fungsi komunikasi harus berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Prinsip sirkuler ini selaras dengan logika model yang dibangun dalam kajian ini, di mana umpan balik publik tidak sekadar diterima tetapi benar-benar diintegrasikan kembali ke dalam siklus perencanaan komunikasi berikutnya.

Untuk memperjelas struktur dan hubungan antar komponen model yang diusulkan, berikut disajikan visualisasi Model Komunikasi Humas Kultural-Dialogis secara menyeluruh. Model ini menggambarkan tiga lapisan yang saling menopang filosofis, strategis, dan operasional dengan siklus enam tahap komunikasi yang secara konsisten berorientasi pada pembangunan kepercayaan publik sebagai tujuan akhir.

Gambar 1. Model Komunikasi Humas Kultural-Dialogis Pemprov Sulsel Berbasis Kearifan Lokal



Sumber: Diolah dari berbagai sumber literatur

Gambar 1 memperlihatkan bahwa model ini tidak bekerja secara linear, melainkan siklikal dan berlapis. Lapisan filosofis yang memuat nilai *siri' na pacce*, *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *abbulo sibatang* menjadi fondasi etis yang melandasi seluruh proses komunikasi dari hulu ke hilir. Lapisan strategis menerjemahkan fondasi tersebut ke dalam empat prinsip operasional, sementara lapisan operasional menggerakkan siklus enam komponen dari pemetaan input kultural hingga evaluasi dan adaptasi yang seluruhnya bermuara pada penguatan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Model ini dinamai sebagai "Model Komunikasi Humas Kultural-Dialogis" dengan tiga lapisan utama yang saling berkaitan. Lapisan pertama adalah lapisan filosofis yang memuat nilai-nilai kearifan lokal (*siri' na pacce, sipakatau, sipakalebba, abbulo sibatang*) sebagai fondasi etis seluruh proses komunikasi. Lapisan kedua adalah lapisan strategis yang mencakup pendekatan dialogis, empatik, dan partisipatif dalam perancangan program komunikasi. Lapisan ketiga adalah lapisan operasional yang mencakup pilihan pesan, saluran, *timing*, dan aktor komunikasi yang berbasis kultural. Hidayat et al. (2018) menemukan bahwa konsep budaya *pekhsiapan, khencana, lestakhi, penghengok, dan penghanggum* dalam tradisi Suku Jakhu relevan dengan komponen perencanaan komunikasi modern, membuktikan bahwa struktur nilai kultural secara inheren memiliki logika perencanaan yang dapat dijembatani dengan teori komunikasi kontemporer.

Prinsip dan Komponen Operasional Model

Model Komunikasi Humas Kultural-Dialogis dioperasionalisasikan melalui empat prinsip utama yang saling menopang satu sama lain. Prinsip pertama adalah *Kultural-Empatik*, yaitu setiap pesan dikonstruksi dengan mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal, menggunakan referensi kultural yang dikenali dan dihormati masyarakat. Prinsip ini menolak homogenisasi pesan yang mengabaikan keragaman sub-kultural Sulsel. Lestari et al. (2026) membuktikan bahwa komunikasi yang berakar pada nilai-nilai kultural seperti empati (*tepa slira*) dan saling menghormati (*nguwongne*) mampu membangun kedekatan emosional yang menjadi pondasi kepercayaan jangka panjang.

Prinsip kedua adalah *Dialogis-Partisipatif*, yaitu komunikasi dirancang sebagai ruang pertukaran dua arah yang setara, di mana warga bukan penerima pasif melainkan mitra aktif dalam pembentukan kebijakan. Sawir (2025) menemukan bahwa integrasi nilai-nilai adat ke dalam layanan publik Papua yang dilakukan dengan melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan menghasilkan peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan publik yang lebih organik. Prinsip ketiga adalah *Autentik-Konsisten*, yang menekankan bahwa kearifan lokal harus hadir secara konsisten dan autentik dalam seluruh komunikasi kelembagaan, bukan situasional. Inkonsistensi antara nilai yang diklaim dan perilaku komunikasi aktual justru merusak kepercayaan secara lebih signifikan daripada tidak mengklaim nilai tersebut sama sekali. Prinsip keempat adalah *Adaptif-Kontekstual*, yang mengakomodasi keragaman sub-kultural dalam masyarakat Sulsel (Bugis, Makassar, Toraja, Mandar) dengan fleksibilitas pesan tanpa kehilangan konsistensi nilai inti.

Tabel 4. Komponen Operasional Model Komunikasi Humas Kultural-Dialogis

Komponen	Deskripsi Operasional	Nilai Kearifan Lokal yang Diintegrasikan	Indikator Keberhasilan
Input Kultural	Pemetaan nilai dan sensitivitas kultural komunitas sasaran	Siri' na pacce, sipakatau	Teridentifikasinya kebutuhan kultural tiap segmen komunitas
Konstruksi Pesan Dialogis	Pesan dirancang berbasis nilai lokal dan kebutuhan publik	Sipakalebba, sipakatau	Tingkat relevansi dan resonansi pesan di komunitas sasaran
Distribusi melalui Saluran Kontekstual	Pemilihan saluran berdasarkan konteks kultural komunitas	Abbulo sibatang	Tingkat keterjangkauan dan penerimaan pesan

Penerimaan Publik	Evaluasi respons komunitas terhadap pesan	Semua nilai kearifan lokal	Tingkat pemahaman dan respons positif komunitas
Feedback Partisipatif	Mekanisme umpan balik yang terstruktur dan inklusif	Abbulo sibatang, sipakalebbi	Kualitas dan kuantitas masukan yang diterima
Evaluasi dan Adaptasi	Revisi strategi berbasis umpan balik kultural	Siri' na pacce	Peningkatan kepercayaan publik secara terukur

Sumber: Diolah dari Hidayat et al. (2018); Lestari et al. (2026); Sawir (2025); Higau et al. (2025)

Relevansi, *Applicability*, dan Implikasi Model

Model Komunikasi Humas Kultural-Dialogis yang dirumuskan dalam kajian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, model ini memperkaya kajian PR pemerintahan dengan menegaskan bahwa efektivitas komunikasi kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau teknik komunikasi semata, tetapi oleh kedalaman resonansi kultural antara institusi dan masyarakat yang dilayaninya. Zainuddin & Djusan (2015) berharap kajian tentang kearifan lokal sebagai bagian dari budaya dapat memotivasi akademisi untuk membangun basis empiris dan pangkalan data tipe-tipe kearifan lokal guna membantu praktisi di korporasi, pemerintah, dan lembaga nirlaba dalam menjangkau publik yang srelevant. Model yang dihasilkan dalam kajian ini merespons harapan tersebut dengan menawarkan kerangka konseptual yang dapat diuji secara empiris.

Secara praktis, model ini memiliki beberapa implikasi langsung bagi Pemprov Sulsel. Biro Humas perlu merekrut atau melatih komunikator yang memiliki literasi budaya lokal (*cultural literacy*) yang memadai, tidak hanya menguasai teknik PR modern. Konten komunikasi digital perlu didesain ulang agar mencerminkan identitas kultural Sulsel, bukan sekadar mengikuti tren komunikasi generik yang tidak memiliki akar budaya. Fardiah et al. (2024) merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan model informasi agar lebih aksesibel secara luas dan memfasilitasi interaksi dua arah melalui platform digital, AI, dan *chatbot*, sambil tetap memastikan bahwa edukasi dan sosialisasi layanan pemerintah dilakukan secara inklusif. Rekomendasi ini perlu diadaptasi dalam konteks Sulsel dengan memastikan bahwa *platform* digital tersebut juga mengintegrasikan nilai-nilai kultural lokal dalam antarmuka dan kontennya.

Yusnendar et al. (2024) menekankan pentingnya komunikasi strategis berbasis pemetaan audiens dan budaya lokal dalam konteks kelembagaan, serta pentingnya kapasitas humas institusional dalam membangun kepercayaan publik dan reputasi yang berkelanjutan. Rekomendasi ini semakin memperkuat urgensi pembangunan jaringan komunikasi berbasis tokoh komunitas sebagai perpanjangan tangan humas di level akar rumput. Model Komunikasi Humas Kultural-Dialogis juga memiliki potensi adopsi lintas daerah model ini relevan bagi pemerintah daerah lain di Indonesia yang memiliki keragaman budaya serupa, dengan penyesuaian pada inventarisasi nilai kearifan lokal masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, model ini menegaskan satu proposisi mendasar: kepercayaan publik dibangun bukan melalui banyaknya informasi yang disebarkan, melainkan melalui kedalaman nilai yang dihayati bersama antara pemerintah dan masyarakat yang dilayaninya. Ketika humas pemerintah berkomunikasi dengan jiwa *sipakatau* memanusiakan warga dan menempatkan mereka sebagai mitra setara kepercayaan

tumbuh bukan karena teknik, melainkan karena nilai. Inilah esensi dari model komunikasi humas berbasis kearifan lokal yang diusulkan bagi Pemprov Sulsel.

Kesimpulan

Kajian ini secara komprehensif mengungkap bahwa praktik komunikasi kehumasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih bertumpu pada model *public information* yang bersifat monologis dan birokratis, sehingga menciptakan jarak psikologis antara institusi pemerintah dan komunitas yang berakar budaya kuat, diperparah oleh kesenjangan digital dan minimnya sensitivitas kultural dalam konstruksi pesan. Kekayaan nilai kearifan lokal Sulawesi Selatan meliputi *siri' na pacce*, *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *abbulo sibatang* sejatinya merupakan modal kultural strategis yang selama ini baru tersentuh pada tataran simbolik, belum dioperasionalkan secara prosedural maupun substansial dalam siklus komunikasi kelembagaan. Bertolak dari sintesis teori *two-way symmetrical* Grunig & Hunt dengan nilai-nilai kultural tersebut, kajian ini menghasilkan Model Komunikasi Humas Kultural-Dialogis berlapis filosofis, strategis, dan operasional, yang digerakkan oleh empat prinsip utama: *kultural-empatik*, *dialogis-partisipatif*, *autentik-konsisten*, dan *adaptif-kontekstual*. Model ini menegaskan bahwa kepercayaan publik lahir dari kedalaman resonansi nilai yang dihayati bersama, bukan dari volume informasi yang disebarkan.

Guna mengaktualisasikan model tersebut, Biro Humas Pemprov Sulsel perlu memprioritaskan penguatan *cultural literacy* aparatur komunikasi melalui pelatihan berbasis nilai lokal yang terstruktur, merekonstruksi konten digital agar mencerminkan identitas kultural Sulsel secara autentik, menginstitutionalisasi tokoh adat dan *opinion leader* komunitas sebagai bagian tetap dari arsitektur komunikasi, serta membangun mekanisme umpan balik publik yang inklusif dan responsif sehingga komunikasi benar-benar bergerak dari pola monologis menuju dialog substantif yang memanusiakan warga sebagai mitra setara. Menjawab tiga rumusan masalah yang diajukan: pertama, model komunikasi humas Pemprov Sulsel yang dominan saat ini adalah *public information* yang bersifat satu arah dan birokratis. Kedua, integrasi kearifan lokal baru menyentuh tataran simbolik, belum prosedural maupun substansial. Ketiga, model Kultural-Dialogis yang dirumuskan hadir sebagai jawaban konseptual atas kedua persoalan tersebut.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Model yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum divalidasi melalui pengujian empiris di lapangan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen internal Biro Humas Pemprov Sulsel menjadikan analisis lebih bertumpu pada literatur akademik dibandingkan data primer kelembagaan. Penelitian berikutnya disarankan menguji model Kultural-Dialogis ini secara empiris melalui studi lapangan, wawancara mendalam dengan praktisi humas Pemprov Sulsel, atau uji coba implementasi pada program komunikasi tertentu. Pendekatan *action research* berbasis komunitas adat Sulsel juga berpotensi memperkuat validitas operasional model ini.

Referensi

- Adib, M. A., & Bahtiar, M. B. (2026). Strategi Humas Desa Wonosoco dalam Meningkatkan Citra Desa Wisata Melalui Promosi Pasar Sarwono. *Al-Nahyan : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(1), 26–36.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.

- Dwiputri, I. N., Permana, Y. H., & Prastiwi, L. F. (2025). Driving Digital Adoption within Small Business: A Study Case of Indonesia Micro-Small-Medium Enterprises. *Jurnal Economica*, 21(2), 304–315.
- Eviany, E., & Athahirah, A. U. (2023). Model of Government Communication to Build Leadership Credibility in Banten Province, Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(2), 161–174. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i2.1217>
- Fardiah, D., Darmawan, F., Rinawati, R., Edya, V., & Supaat, M. (2024). *Digital transformation through electronic-based government system performance as public relations strategy*. 9(1), 23–48.
- Harahap, A. R. M., & Kholil, S. (2025). Strategi Komunikasi Pemerintah Desa dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Alam Aek Sijorni Kecamatan Sayurmatangi Tapanuli Selatan. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 466–477. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.3905>
- Hidayat, D., Kuswarno, E., Zubair, F., & Hafiar, H. (2018). Public relations communication behavior through a local-wisdom approach: The findings of public relations components via ethnography as methodology. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 34(3), 56–72. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2018-3403-04>
- Higau, E., B, J., & Nurmiyati, N. (2025). Model Tata Kelola CSR Berbasis Collaborative Governance dan Kearifan Lokal. *International Journal of Demos*, 7(3), 140–152.
- Lestari, E., Rahmanto, A. N., & Susanti, R. (2026). Public relations mitigation : Using local wisdom to secure trust in private hospitals. *PROfesi Humas*, 10(2), 236–256.
- Manshur, A. L., Azura, S. Z., Izzah, N., & Sari, A. W. (2025). Kearifan Lokal dan Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik (Studi Kasus : DPMPTSP Surabaya). *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 4.
- Muktiarsih, A. Y., Wisudawanto, R., & Indreswari, E. P. (2025). Kajian MKajian Model Komunikasi Humas Pemerintah Daerah (Studi Kasus Model Komunikasi Daerah Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen pada Acara HUT Sragen Ke-278odel Komunikasi Humas Pemerintah Daerah. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 295–308. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v3i1.1624>
- Nur, N. M., Zelfia, & Ibrahim, M. R. (2025). Implementasi Cyber Public Relations Dalam Meningkatkan Citra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 6(2), 120–125.
- Saoqillah, A., Nala, A., & Samsiah, S. (2025). Local Wisdom-Based Public Relations Model in Building the Image of the Islamic Communication and Broadcasting Study Program. *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(1), 229–238. <https://doi.org/10.54150/syiar.v5i1.574>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sawir, M. (2025). Building a Culture of Administration Based on Local Wisdom: Transforming Public Services in Papua. *Musamus Journal of Public Administration*, 7(2), 257–265.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Yusnendar, L. D., Wijana, I. N., & Zaenab, S. (2024). Strategi Komunikasi Perguruan Tinggi untuk Membangun Image Positif Masyarakat di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. *Jurnal Ilmu Komunikasi : Gelis*, 1(2), 75–86. <https://doi.org/10.63577/lis.v1i2.122>
- Zainuddin, H., & Djusan, A. (2015). Communication Based On Local Wisdoms To Create Two-Way Symmetrical Public Relations. *The Indonesian Journal of Communication Studies*, 08(2).